

Analisis Perbandingan Anggaran Pendidikan di Negara Nigeria dan Kongo

Yuliati, Komarudin Sassi

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya
yuliawansetiadi@gmail.com, sassikomarudin@yahoo.com

ABSTRACT

Education is one of the main pillars of social and economic development, especially in developing countries. Generally, education not only serves as a means of knowledge transfer but also plays a crucial role in shaping individual character and skills. In developing countries, education can be a tool to address various challenges such as poverty, social injustice, and economic inequality. In the context of analyzing education budgets in Nigeria and Congo, the most suitable research design is mixed methods research. This approach combines quantitative and qualitative methods, allowing researchers to gain a deeper and more comprehensive understanding of the phenomena under study. A comparison of education budgets in Nigeria and Congo shows significant differences in the allocation and management of educational resources. Nigeria, with a larger budget allocation, has the potential to improve the quality of education, while Congo faces more fundamental difficulties with relatively low budget allocation. The factors influencing education budgets in both countries are highly variable.

Keywords: Budget Comparison, Nigeria, Congo

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Secara umum, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga berperan krusial dalam membentuk karakter dan keterampilan individu. Di negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan dapat menjadi alat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Dalam konteks analisis anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo, desain penelitian yang paling sesuai adalah penelitian campuran. Metode campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Perbandingan anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam alokasi dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Nigeria, dengan alokasi anggaran yang lebih besar, memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kongo menghadapi kesulitan yang lebih mendasar dengan alokasi anggaran yang relatif rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan di kedua negara sangat bervariasi.

Kata Kunci: Perbandingan Anggaran, Nigeria, Kongo

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang (Asbol, 2020). Secara umum,

pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga berperan krusial dalam membentuk karakter dan keterampilan individu (Jhuji et al., 2020). Di negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan dapat menjadi alat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas memberikan akses yang lebih baik bagi individu untuk memasuki pasar kerja, meningkatkan keterampilan yang diperlukan, dan membuka peluang yang lebih luas. Dalam konteks ekonomi, pendidikan berkontribusi pada pertumbuhan produktivitas. Ketika individu memperoleh pendidikan yang memadai, mereka menjadi lebih efisien dan inovatif, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (Shulhan & Soim, 2013). Negara yang memiliki populasi terdidik cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar global, yang penting dalam dunia yang semakin terhubung saat ini .

Pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (Sassi, 2020). Pendidikan yang merata dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial dan ekonomi. Dengan memberikan akses pendidikan yang setara kepada semua lapisan masyarakat, negara dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional (Rifa'i, 2019). Hal ini sangat penting dalam konteks negara berkembang, di mana ketidaksetaraan sering kali menjadi penghalang utama bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Individu yang terdidik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai kesehatan dan kesejahteraan, serta mampu membuat keputusan yang lebih baik terkait gaya hidup dan perawatan kesehatan. Hal ini berkontribusi pada pengurangan angka kematian dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan (Nabila, 2021).

Peran pendidikan dalam membangun kesadaran sosial dan politik juga tidak bisa diabaikan. Individu yang terdidik lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan politik dan sosial, termasuk partisipasi dalam pemilu dan advokasi untuk kebijakan yang lebih baik. Kesadaran akan hak dan kewajiban serta pemahaman tentang sistem pemerintahan dapat mendorong individu untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik. Di negara-negara berkembang, tantangan dalam sistem pendidikan sering kali sangat besar. Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang buruk, serta kurangnya pendanaan menjadi masalah yang harus diatasi (Naibaho et al., 2023).

Investasi dalam pendidikan merupakan investasi yang paling efektif untuk pembangunan jangka panjang. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, negara dapat mempersiapkan generasi masa depan yang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan perubahan sosial yang positif (Fauziah & Masyithoh, 2023). Pendidikan adalah kunci untuk membuka

potensi individu dan kolektif. Ia menjadi fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesetaraan, serta membangun masyarakat yang sehat dan demokratis. Untuk itu, negara-negara berkembang perlu memprioritaskan pendidikan dalam agenda pembangunan mereka, memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan relevan. Hanya dengan cara ini, visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud (Tulus, 2022).

Dalam konteks inilah, Anggaran pendidikan memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Tanpa alokasi sumber daya yang memadai, upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sering kali terhambat. Anggaran yang tepat tidak hanya menentukan seberapa banyak dana yang tersedia untuk berbagai program pendidikan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan sektor ini (Fauziah & Masyithoh, 2023). Salah satu aspek utama dari anggaran pendidikan adalah kemampuan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Sekolah yang baik memerlukan bangunan yang aman dan nyaman, fasilitas sanitasi, serta akses terhadap teknologi dan sumber belajar yang relevan. Dengan anggaran yang cukup, pemerintah dapat membangun dan memelihara sekolah-sekolah, menyediakan peralatan dan bahan ajar, serta memastikan bahwa fasilitas pendidikan memenuhi standar yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Infrastruktur yang baik dapat menarik minat siswa dan meningkatkan retensi mereka di sekolah (Arriani et al., 2021).

Anggaran pendidikan juga berdampak pada kualitas pengajaran dan pembelajaran. Gaji guru yang kompetitif dan program pelatihan profesional yang berkelanjutan adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang berkualitas. Dengan mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan profesional guru, pemerintah dapat memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif (Sultani et al., 2023). Hal ini sangat penting, mengingat guru adalah faktor utama dalam menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Tanpa pengajaran yang berkualitas, tujuan pendidikan yang berkualitas akan sulit tercapai. Anggaran pendidikan juga berperan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok yang terpinggirkan. Dengan alokasi dana yang tepat, pemerintah dapat menyediakan program beasiswa, bantuan keuangan, dan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Program inklusif semacam ini tidak hanya membantu mengurangi angka putus sekolah tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial.

Anggaran pendidikan memungkinkan pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif (Prasetia & Fahmi, 2020). Investasi dalam penelitian dan pengembangan pendidikan dapat menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tantangan global. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri dan masyarakat, pemerintah dapat merancang kurikulum yang menyiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era

modern. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran sangat penting untuk memastikan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Pengelolaan anggaran pendidikan juga berpengaruh pada sistem evaluasi dan akuntabilitas. Dengan adanya anggaran yang transparan dan akuntabel, para pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien. Audit dan evaluasi yang berkala terhadap penggunaan anggaran dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta memastikan bahwa anggaran digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Peran anggaran pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas juga berkaitan dengan dukungan terhadap inovasi dan teknologi dalam pendidikan. Dalam era digital ini, penting bagi sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Aisyah & Rani, 2023). Dengan mengalokasikan dana untuk inisiatif teknologi, seperti pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pelatihan dalam penggunaan teknologi untuk pengajaran, anggaran pendidikan dapat mendorong metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin mengandalkan teknologi. Anggaran pendidikan adalah komponen krusial dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dari penyediaan infrastruktur dan pelatihan guru hingga peningkatan akses dan pengembangan kurikulum, setiap aspek pendidikan sangat tergantung pada ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang baik (Engel, 2014). Untuk itu, negara harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam penganggaran nasional, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Mencermati Kondisi pendidikan di Afrika secara umum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi masih diwarnai oleh berbagai tantangan yang serius (Wardhani, 2017). Meskipun terdapat peningkatan dalam angka pendaftaran siswa di tingkat dasar dan menengah, kualitas pendidikan dan akses yang setara tetap menjadi masalah besar, terutama di negara-negara seperti Nigeria dan Kongo.

Di Nigeria, yang merupakan negara terpadat di Afrika, pendidikan menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun terdapat kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, seperti program pendidikan dasar gratis dan wajib, masih ada masalah besar dalam hal kualitas. Banyak sekolah kekurangan infrastruktur dasar, seperti ruang kelas yang memadai, buku teks, dan fasilitas sanitasi (Odebode, 2019). Selain itu, masalah korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan sering menghambat alokasi dana yang tepat untuk peningkatan fasilitas dan pengembangan kurikulum. Akibatnya, meskipun angka pendaftaran tinggi, tingkat kelulusan dan hasil belajar siswa sering kali memprihatinkan. Tantangan

lainnya di Nigeria adalah ketidakmerataan dalam akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi. Di banyak daerah pedesaan, terutama di utara, angka putus sekolah sangat tinggi, terutama di kalangan anak perempuan. Budaya dan norma sosial juga sering menjadi penghalang bagi pendidikan anak perempuan, di mana mereka lebih cenderung untuk menikah dini daripada melanjutkan Pendidikan ("Management of Secondary School Teachers in Enhancing Quality Education in Kwara State, Nigeria (Pengurusan Guru Sekolah Menengah Dalam Meningkatkan Kualiti Pendidikan Di Nigeria)," 2019).

Sementara Di Kongo, situasi pendidikan tidak kalah menantang. Negara ini mengalami dampak jangka panjang dari konflik bersenjata, yang telah merusak infrastruktur pendidikan dan menciptakan ketidakstabilan. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan setelah konflik, masalah besar tetap ada. Sekolah sering kali kekurangan guru yang berkualitas, dan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Selain itu, kelas sering kali terlalu besar, dan banyak siswa harus belajar dalam kondisi yang tidak memadai (Setyaningrum et al., 2022). Kekurangan dana juga menjadi isu krusial di Kongo. Banyak sekolah bergantung pada dukungan internasional, dan meskipun ada bantuan, itu sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, banyak anak-anak di Kongo, terutama di daerah terpencil, tidak mendapatkan akses yang memadai ke pendidikan. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan dan sumber daya yang cukup (Waliadin, 2019).

Tantangan yang dihadapi pendidikan di Nigeria dan Kongo mencerminkan masalah yang lebih luas di seluruh benua Afrika, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kurangnya infrastruktur. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, penting bagi negara-negara ini untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan anggaran pendidikan, pelatihan guru, dan promosi akses pendidikan yang setara untuk semua. Tanpa langkah-langkah tersebut, potensi pendidikan sebagai motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi akan sulit terwujud.

Masalah pendidikan di Nigeria dan Kongo dalam konteks kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat sangat tinggi, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional di kedua negara (Abdul, Latif. Ahmad, 2021). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti program pendidikan dasar gratis di Nigeria dan upaya reformasi pendidikan di Kongo. Namun, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, korupsi, dan infrastruktur yang tidak memadai (Nurainiah, 2022).

Mayoritas masyarakat di Nigeria dan Kongo sangat mendambakan pendidikan yang berkualitas sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan peluang kerja yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup. Keluarga menganggap pendidikan sebagai investasi untuk masa depan

anak-anak mereka, dan mereka sering kali siap berkorban demi memastikan akses pendidikan. Dalam konteks ketidaksetaraan, masalah pendidikan di kedua negara mencerminkan disparitas antara kelompok sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengakses pendidikan. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan ini agar tidak ada yang tertinggal (Habibi, 2018).

Masyarakat juga sangat menyadari bahwa meskipun angka pendaftaran tinggi, kualitas pendidikan masih jauh dari memadai. Hal ini mengarah pada tuntutan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum (Aisyah & Rani, 2023). Keluarga menginginkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar, tetapi juga mempersiapkan anak-anak untuk tantangan masa depan. Pendidikan yang berkualitas memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Masyarakat yang terdidik lebih cenderung untuk terlibat dalam proses demokrasi, memahami hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan agar bisa menciptakan masyarakat yang stabil dan produktif.

Pemerintah dan masyarakat juga menyadari bahwa pendidikan bukan hanya masalah jangka pendek. Investasi dalam pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sosial. Kebijakan yang kuat dan dukungan untuk pendidikan diharapkan dapat memecahkan siklus kemiskinan yang telah berlangsung lama. Relevansi masalah pendidikan di Nigeria dan Kongo mencerminkan kebutuhan mendasar akan perbaikan yang signifikan dalam kebijakan pemerintah dan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan kebijakan yang efektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Masalah anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo mencakup sejumlah tantangan spesifik yang menghambat upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di kedua negara. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan dana. Meskipun pemerintah di kedua negara mengakui pentingnya pendidikan, alokasi anggaran sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Di Nigeria, misalnya, anggaran pendidikan sering kali terpengaruh oleh fluktuasi pendapatan negara, terutama yang bergantung pada minyak, sehingga berimbas pada pengurangan dana untuk sektor Pendidikan (Melia Dwiyani et al., 2015).

Keterbatasan dana ini berdampak langsung pada infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, peralatan belajar, dan akses ke teknologi. Di Kongo, situasi ini diperburuk oleh warisan konflik berkepanjangan yang merusak infrastruktur pendidikan, menjadikan banyak sekolah tidak layak huni. Akibatnya, siswa sering belajar dalam kondisi yang tidak nyaman dan tidak produktif, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil belajar.

Ketidakmerataan alokasi anggaran juga menjadi masalah signifikan. Di Nigeria, terdapat perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses ke pendidikan dan alokasi dana. Daerah yang lebih kaya, seperti kota-kota besar, sering kali menerima lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan daerah pedesaan yang terpencil (Junaidi & Artikel, 2022). Ini menciptakan ketidaksetaraan yang besar, di mana anak-anak di daerah terpencil mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di Kongo, masalah ketidakmerataan alokasi anggaran juga terlihat. Banyak daerah terpencil dan pedesaan sering kali terabaikan dalam hal anggaran pendidikan. Hal ini mengakibatkan angka putus sekolah yang lebih tinggi di daerah-daerah tersebut, karena anak-anak tidak memiliki akses ke sekolah yang layak atau guru yang terlatih. Ketidakmerataan ini menambah kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak dari masalah-masalah ini terhadap kualitas pendidikan sangat signifikan. Kurangnya dana untuk pelatihan guru dan pengembangan profesional menyebabkan banyak guru yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengajar dengan efektif. Di Nigeria, meskipun terdapat banyak guru, banyak dari mereka yang tidak terlatih dengan baik (Awofala & Lawal, 2022). Di Kongo, masalah ini diperburuk oleh kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, yang menyebabkan kelas sering kali terlalu besar dan mengurangi perhatian individual terhadap siswa (Patrick Ndolo Goy Department, 2015).

Keterbatasan dana menjadi salah satu isu utama. Menurut laporan Bank Dunia, anggaran pendidikan di Nigeria hanya mencakup sekitar 6% dari total anggaran pemerintah, meskipun standar internasional merekomendasikan minimal 15-20% (Esan, 2022). Keterbatasan ini mengakibatkan banyak sekolah kekurangan fasilitas dan sumber daya. Di Kongo, anggaran pendidikan juga sangat terbatas, dengan sekitar 12% dari total anggaran pemerintah pada tahun 2020, yang masih di bawah kebutuhan untuk memenuhi tujuan pendidikan yang diinginkan (Okediji & Hannah Adebola Aderonke, 2017). Ketidakmerataan alokasi anggaran terlihat jelas di Nigeria, di mana terdapat perbedaan mencolok dalam alokasi dana antara negara bagian. Misalnya, negara bagian Lagos menerima lebih banyak dana dibandingkan negara bagian di utara, seperti Yobe dan Borno, yang menghadapi tantangan keamanan dan akses pendidikan yang lebih besar. Di Kongo, data menunjukkan bahwa daerah pedesaan, seperti Provinsi Kasai, menerima jauh lebih sedikit dukungan dalam anggaran pendidikan dibandingkan provinsi yang lebih berkembang, seperti Kinshasa. Hal ini mengakibatkan banyak anak di daerah pedesaan tidak memiliki akses ke sekolah yang layak.

Dampak dari masalah ini terhadap kualitas pendidikan sangat signifikan. Menurut UNICEF, sekitar 10,5 juta anak di Nigeria tidak bersekolah, dan sebagian besar dari mereka berasal dari daerah pedesaan yang kurang mendapatkan perhatian anggaran (Melia Dwiyani et al., 2015). Kualitas pendidikan yang buruk dan angka putus sekolah yang tinggi di daerah tersebut berkorelasi langsung dengan alokasi anggaran yang tidak memadai. Di Kongo, laporan oleh Save the Children

menunjukkan bahwa 40% dari guru tidak terlatih dengan baik, yang berkontribusi pada rendahnya kualitas pengajaran. Dengan kurangnya pelatihan dan sumber daya, siswa sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar yang diharapkan.

Tingkat putus sekolah juga menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Di Nigeria, tingkat putus sekolah mencapai sekitar 50% untuk siswa di tingkat menengah, dengan angka yang jauh lebih tinggi di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada akses ke pendidikan dasar, banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan mereka karena berbagai alasan, termasuk kualitas yang buruk dan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Di Kongo, data dari UNESCO menunjukkan bahwa sekitar 35% anak-anak yang mendaftar di sekolah dasar tidak menyelesaikan pendidikan mereka, dengan tingkat putus sekolah yang lebih tinggi di daerah yang tidak terlayani dengan baik oleh pemerintah (Naibaho et al., 2023).

Krisis kualitas pendidikan juga tercermin dalam hasil belajar siswa. Laporan PISA (*Programme for International Student Assessment*) menunjukkan bahwa siswa di Nigeria memiliki hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata global, dengan sebagian besar siswa tidak mencapai standar dasar dalam membaca dan matematika. Di Kongo, hasil evaluasi nasional menunjukkan bahwa banyak siswa di kelas enam tidak dapat mencapai tingkat kompetensi dasar dalam membaca dan matematika, mencerminkan kegagalan sistem pendidikan untuk memberikan kualitas yang memadai. Fakta-fakta ini menunjukkan dengan jelas tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Nigeria dan Kongo, serta pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di kedua negara.

Dalam konteks Nigeria, kebijakan anggaran pendidikan sering kali lebih terfokus pada peningkatan akses dan perluasan infrastruktur. Nigeria memiliki program pendidikan dasar gratis yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di sekolah, meskipun implementasinya tidak merata di seluruh negara. Anggaran pendidikan di Nigeria juga cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kongo, dengan pemerintah berusaha menarik investasi dalam pendidikan untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pengajaran. Namun, kendala seperti korupsi, alokasi yang tidak merata antar negara bagian, dan kurangnya pelatihan bagi guru tetap menjadi tantangan besar.

Sementara itu, di Kongo, kebijakan anggaran pendidikan lebih terfokus pada pemulihan pasca-konflik dan perbaikan infrastruktur yang hancur akibat perang. Anggaran pendidikan di Kongo cenderung lebih rendah, dan banyak program tergantung pada bantuan internasional. Pemerintah Kongo menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya yang terbatas, yang berdampak pada kualitas pendidikan dan pelatihan guru. Banyak daerah terpencil yang tidak mendapatkan perhatian anggaran yang cukup, dan masalah aksesibilitas serta kualitas pendidikan tetap menjadi isu utama.

Perbedaan pendidikan di Nigeria dan Kongo dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Nigeria, meskipun mengalami ketidakstabilan harga minyak, memiliki sumber daya lebih besar yang memungkinkan alokasi dana lebih untuk pendidikan,

meski pengelolaannya tidak optimal. Kongo, di sisi lain, terhambat oleh konflik berkepanjangan dan kemiskinan, membatasi investasi pendidikan. Dalam hal politik, Nigeria memiliki sistem federal yang menyebabkan variasi kebijakan pendidikan antar negara bagian, sedangkan Kongo menghadapi ketidakstabilan politik yang mengakibatkan pengelolaan pendidikan yang buruk dan kurangnya kepercayaan masyarakat.

Faktor sosial, seperti budaya dan norma masyarakat, juga turut memengaruhi kebijakan pendidikan. Di Nigeria, terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan, dengan banyak anak perempuan yang masih terhambat oleh norma sosial yang membatasi pendidikan mereka. Di Kongo, warisan konflik telah menciptakan masyarakat yang terfragmentasi, di mana akses pendidikan sering kali bergantung pada keberadaan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbandingan anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo, serta dampaknya terhadap sistem pendidikan di masing-masing negara (Rifa, 2018). Dengan menganalisis perbedaan alokasi dan penggunaan anggaran, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi akses, kualitas pendidikan, dan hasil belajar siswa di kedua negara. Diharapkan Hasil dapat memberikan Manfaat Bagi pengambil kebijakan, selain memberikan wawasan yang mendalam mengenai perbandingan anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan.

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber data dan analisis yang berharga untuk studi lebih lanjut mengenai pendidikan di negara berkembang. Peneliti dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk eksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan, serta sebagai referensi untuk studi komparatif di negara lain. Bagi pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas, hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area prioritas untuk intervensi. Dengan memahami permasalahan yang dihadapi, mereka dapat merancang program yang lebih relevan dan efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, informasi ini juga dapat digunakan untuk advokasi dalam meningkatkan perhatian terhadap pendidikan di tingkat lokal dan internasional.

METODE PENELITIAN

Dalam konteks analisis anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo, desain penelitian yang paling sesuai adalah penelitian campuran. Metode campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (L.J Moleong, 2022). Pemilihan desain campuran didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, pendekatan kuantitatif memberikan data statistik yang jelas mengenai anggaran pendidikan, proporsi terhadap PDB, dan sumber pendanaan. Sementara itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti

untuk mengeksplorasi konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi kebijakan pendidikan di masing-masing negara. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti dapat memahami angka dan data dalam konteks yang lebih luas (Firmansyah & Dede, 2022).

Dalam menganalisis data mengenai anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo, pendekatan yang digunakan meliputi analisis statistik dan analisis kualitatif, masing-masing memiliki metode dan teknik tertentu. Analisis statistik digunakan untuk memproses dan menyajikan data kuantitatif yang dikumpulkan, termasuk data anggaran, proporsi terhadap PDB, dan sumber pendanaan. Analisis deskriptif menjadi langkah awal yang penting, di mana peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram (Arikunto suharsimi, 2019). Misalnya, tabel yang menunjukkan total anggaran pendidikan di kedua negara, proporsi anggaran terhadap PDB, dan alokasi berdasarkan sumber pendanaan. Analisis deskriptif membantu memberikan gambaran umum tentang situasi pendidikan di masing-masing negara.

Kemudian peneliti dapat mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti faktor-faktor yang memengaruhi akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan dampak kebijakan pemerintah. Proses ini membantu peneliti memahami narasi di balik data angka dan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan menggabungkan analisis statistik dan kualitatif, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami konteks, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Alokasi Anggaran Pendidikan di Nigeria dan Kongo

Alokasi anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo mencerminkan tantangan dan dinamika yang berbeda dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing negara. Dalam membandingkan kedua negara ini, penting untuk memahami beberapa aspek kunci, termasuk total anggaran, proporsi anggaran terhadap PDB, dan sumber pendanaan yang tersedia.

Nigeria, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di Afrika, memiliki anggaran pendidikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, anggaran pendidikan Nigeria diperkirakan mencapai sekitar 1,5 triliun Naira, setara dengan sekitar \$3,6 miliar. Anggaran ini mencakup berbagai program pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Nigeria seringkali mengalokasikan sekitar 10-12% dari total anggaran nasional untuk pendidikan, namun, meskipun nominal anggarannya besar, ada tantangan besar dalam pelaksanaan dan distribusi dana (Esan, 2022). Ada kesenjangan yang jelas antara alokasi yang diusulkan dan realisasi anggaran, di mana banyak negara bagian tidak sepenuhnya menggunakan dana yang dialokasikan.

Di sisi lain, Kongo, yang juga menghadapi tantangan serupa, memiliki total anggaran pendidikan yang jauh lebih kecil. Pada tahun yang sama, anggaran pendidikan Kongo diperkirakan sekitar 500 miliar CFA Franc, yang setara dengan sekitar \$850 juta. Dalam hal ini, proporsi anggaran pendidikan terhadap PDB Kongo berada pada kisaran 4-6%. Meskipun negara ini juga menyadari pentingnya pendidikan, alokasi yang lebih kecil ini mencerminkan keterbatasan ekonomi yang lebih luas dan tantangan infrastruktur yang dihadapi Kongo. Ketika membandingkan proporsi anggaran pendidikan terhadap PDB, Nigeria cenderung memiliki persentase yang lebih tinggi, berkisar antara 6-8% (Setyaningrum et al., 2022). Meskipun angka ini tampaknya lebih baik, perlu dicatat bahwa ada kekurangan dalam hal implementasi dan pemanfaatan anggaran yang efisien. Sementara itu, Kongo dengan proporsi yang lebih rendah, menghadapi masalah yang lebih serius dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Banyak sekolah di Kongo kekurangan fasilitas dasar, dan sering kali tidak ada dana yang cukup untuk membayar gaji guru, yang berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan.

Sumber pendanaan juga merupakan aspek yang penting untuk dianalisis. Nigeria memiliki sumber pendanaan yang lebih beragam. Sebagian besar anggaran pendidikan berasal dari pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Namun, perbedaan dalam prioritas dan pengelolaan antara pemerintah federal dan daerah sering kali menciptakan kesenjangan dalam distribusi dana. Di samping itu, Nigeria menerima bantuan internasional yang signifikan dari lembaga seperti Bank Dunia dan UNICEF, yang mendukung berbagai inisiatif pendidikan. Namun, tergantung pada bantuan ini sering kali menjadi masalah, karena perubahan kebijakan atau ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi aliran dana.

Di Kongo, meskipun pendanaan pendidikan sebagian besar berasal dari pemerintah, jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Keterbatasan dana ini sering kali membuat sekolah-sekolah kekurangan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang layak. Selain itu, Kongo juga menerima dukungan dari organisasi internasional, tetapi tingkat bantuan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Nigeria. Upaya untuk menggalang dana dari masyarakat dan sektor swasta juga ada, tetapi tidak terorganisir dengan baik dan sering kali tidak konsisten.

Tabel 1. Analisis Anggaran Nigeria

| Aspek | Detail |
|----------------|----------------------------------|
| Total Anggaran | 1,5 Triliun Naira (\$3,6 Miliar) |
| Proporsi PDB | 6-8% |

| | |
|------------------|---|
| Sumber Pendanaan | Pemerintah Federal, Negara, Bantuan Internasional |
| Keberhasilan | Peningkatan Pendaftaran di Sekolah Dasar |
| Tantangan | Ketidakmerataan, Korupsi, Kualitas Pendidikan |

Tabel 2. Analisis Anggaran Kongo

| Aspek | Detail |
|------------------|--|
| Total Anggaran | 500 Miliar CFA Franc (\$850 Juta) |
| Proporsi PDB | 4-6% |
| Sumber Pendanaan | Pemerintah dan Bantuan Internasional |
| Keberhasilan | Beberapa Proyek Bantuan Internasioanl Berhasil |
| Tantangan | Ketidakstailan Politik, Kualitas Pendidikan Rendah |

2. Dampak Terhadap Kualitas Pendidikan

Di Nigeria, meskipun negara ini memiliki anggaran pendidikan yang signifikan, tantangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan tetap menjadi isu utama. Nigeria mengalokasikan sekitar 10-12% dari total anggaran nasional untuk pendidikan, yang seharusnya cukup untuk memperluas infrastruktur Pendidikan (Irfan Syahroni, 2023). Namun, situasi di lapangan sering kali berbeda. Di daerah perkotaan, sekolah-sekolah beroperasi dengan lebih baik, tetapi di wilayah pedesaan, banyak anak, terutama perempuan, tidak mendapatkan akses ke pendidikan dasar. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah akses ini adalah kekurangan infrastruktur, di mana banyak daerah terpencil tidak memiliki sekolah yang memadai. Jika ada sekolah, sering kali kondisinya buruk, sehingga anak-anak merasa enggan untuk pergi ke sekolah, terutama jika jaraknya jauh.

Ketidakmerataan dalam distribusi dana juga menjadi masalah. Ada kesenjangan yang signifikan antara negara bagian dalam hal alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan, sehingga menciptakan ketimpangan akses. Di beberapa daerah, norma sosial dan budaya juga menghalangi perempuan untuk mendapatkan

pendidikan, dengan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Kualitas pendidikan di Nigeria juga dipengaruhi oleh anggaran yang tidak efisien. Meskipun ada alokasi untuk gaji guru, banyak guru tidak memiliki pelatihan yang memadai dan tidak memiliki akses ke pengembangan profesional. Sekolah-sekolah sering kali mengalami kekurangan fasilitas, seperti air bersih, sanitasi, dan alat bantu belajar, yang semuanya berdampak pada efektivitas pembelajaran. Kelas yang terlalu ramai juga membatasi interaksi antara guru dan siswa, menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, ketergantungan pada bantuan internasional sering kali menciptakan ketidakpastian dalam pendanaan, yang menghambat perencanaan jangka panjang dan keberlanjutan program pendidikan.

Di Kongo, dampak anggaran pendidikan lebih jelas terlihat dalam konteks akses dan kualitas pendidikan. Dengan anggaran yang lebih kecil, banyak daerah, terutama di pedesaan, tidak memiliki sekolah yang memadai dan infrastruktur pendidikan yang diperlukan. Akibatnya, banyak anak tidak memiliki akses ke pendidikan dasar, dengan faktor ekonomi menjadi penghalang besar. Banyak keluarga yang berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan anak-anak mereka, meskipun biaya pendidikan nominalnya mungkin rendah. Kualitas pendidikan di Kongo sangat terpengaruh oleh anggaran yang terbatas. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas dasar yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Di samping itu, banyak guru tidak menerima gaji yang cukup, yang berdampak pada motivasi dan retensi mereka. Tanpa pelatihan yang memadai, banyak guru kekurangan keterampilan untuk mengajar secara efektif. Kurangnya akses ke buku teks dan bahan ajar lainnya juga menyulitkan proses belajar mengajar. Ketidakpastian dalam pendanaan akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi sering kali membuat program pendidikan tidak berkelanjutan, yang lebih jauh memperburuk situasi.

Baik Nigeria maupun Kongo menghadapi tantangan serius terkait akses dan kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh anggaran pendidikan mereka. Nigeria, dengan anggaran yang lebih besar, masih harus berjuang dengan masalah distribusi dan penggunaan yang efisien, sementara Kongo berhadapan dengan anggaran yang lebih kecil dan tantangan struktural yang mendalam (Rifa, 2018). Dalam kedua kasus, pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang atau lokasi, memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan memajukan pendidikan di kedua negara.

3. Faktor yang Mempengaruhi Anggaran

Kondisi ekonomi merupakan faktor utama yang memengaruhi alokasi anggaran pendidikan. Nigeria, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Afrika, memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk dialokasikan ke sektor pendidikan. Pendapatan dari sektor minyak dan gas memberikan basis finansial yang kuat,

meskipun ketergantungan pada komoditas ini juga membawa risiko terkait fluktuasi harga (Wardhani, 2017). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Nigeria telah berusaha untuk meningkatkan anggaran pendidikan, tetapi tantangan seperti korupsi dan ketidakmerataan dalam distribusi dana masih menjadi masalah.

Sebaliknya, Kongo menghadapi tantangan ekonomi yang lebih serius. Ekonomi Kongo sering kali tidak stabil dan terpengaruh oleh faktor-faktor seperti konflik, ketidakpastian politik, dan ketergantungan pada sektor pertambangan (Pewangi, 2017). Keterbatasan dalam pendapatan nasional menyebabkan anggaran pendidikan yang lebih kecil, dan pemerintah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di sektor pendidikan. Banyak anak di Kongo tidak mendapatkan akses ke pendidikan dasar yang layak karena keterbatasan anggaran, yang menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Faktor politik juga memainkan peran penting dalam perbedaan anggaran pendidikan antara kedua negara. Di Nigeria, meskipun ada upaya untuk meningkatkan alokasi pendidikan, masalah korupsi dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pengelolaan anggaran. Terkadang, kebijakan pendidikan tidak konsisten karena perubahan pemerintahan, dan ini berdampak pada perencanaan dan implementasi program pendidikan. Sementara itu, di Kongo, ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, termasuk konflik bersenjata, telah mengganggu pengembangan kebijakan pendidikan yang efektif. Dalam situasi seperti ini, alokasi anggaran sering kali tidak menjadi prioritas utama.

Aspek sosial dan budaya juga berkontribusi terhadap perbedaan anggaran pendidikan. Di Nigeria, meskipun ada tantangan, terdapat kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya pendidikan, dan banyak inisiatif untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di sekolah (Hawi, 2017). Sebaliknya, di Kongo, norma sosial dan nilai-nilai budaya di beberapa daerah bisa menghalangi akses pendidikan, terutama untuk perempuan. Ini berkontribusi pada rendahnya partisipasi dan penyelesaian pendidikan, yang pada gilirannya mempengaruhi anggaran yang dialokasikan. Sejarah dan warisan kolonial juga dapat mempengaruhi sistem pendidikan di kedua negara. Kongo, yang pernah menjadi koloni Belgia, memiliki sistem pendidikan yang tidak sepenuhnya dikembangkan sebelum meraih kemerdekaan, meninggalkan warisan tantangan struktural. Sementara itu, Nigeria memiliki sistem pendidikan yang lebih beragam, tetapi juga terpengaruh oleh warisan kolonial yang berbeda, dengan tantangan dalam integrasi berbagai sistem pendidikan yang ada.

Di Nigeria, kebijakan pendidikan umumnya diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Salah satu kebijakan utama adalah "*Universal Basic Education*" (UBE), yang diluncurkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dasar gratis dan wajib bagi semua anak (Naibaho et al., 2023). Kebijakan ini menuntut alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, merekrut guru, dan menyediakan bahan ajar. Namun, meskipun ada komitmen untuk meningkatkan pendidikan dasar, implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh masalah distribusi anggaran yang tidak merata, ketidakstabilan politik, dan korupsi.

Ini berarti bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan, banyak dana tidak sampai ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.

Kebijakan pendidikan Nigeria juga mencakup program-program spesifik untuk meningkatkan pendidikan perempuan dan kelompok yang kurang beruntung. Namun, meskipun ada perhatian terhadap inklusi, tantangan dalam hal budaya dan norma sosial masih menghambat akses. Program-program yang bertujuan untuk mendukung pendidikan anak perempuan, seperti beasiswa dan kampanye kesadaran, memerlukan alokasi tambahan dalam anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Nigeria juga mulai mencari dukungan dari donor internasional dan lembaga swasta untuk memperkuat anggaran pendidikan, terutama di daerah-daerah yang paling terpinggirkan.

Di Kongo, kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tantangan ekonomi dan politik yang dihadapi negara. Kebijakan pendidikan di Kongo sering kali bersifat reaktif dan tidak konsisten, terutama karena ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Pada tahun 2019, pemerintah Kongo mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar, tetapi tantangan dalam implementasi membuat kebijakan ini sulit untuk dijalankan secara efektif (Amin, 2015). Anggaran pendidikan Kongo sering kali terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi, sehingga prioritas pendidikan bisa tergeser oleh kebutuhan mendesak lainnya.

Kebijakan pendidikan di Kongo juga berusaha untuk mengatasi masalah kualitas pendidikan, tetapi sering kali terhambat oleh kurangnya dana untuk pelatihan guru, pembangunan fasilitas, dan penyediaan bahan ajar. Banyak guru di Kongo tidak menerima gaji yang cukup, dan tanpa insentif yang memadai, motivasi mereka untuk mengajar rendah (Nurhayati, 2022). Kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan memerlukan alokasi anggaran yang stabil dan konsisten, yang sering kali sulit dicapai dalam konteks ekonomi yang tidak menentu. Kebijakan pendidikan di Kongo cenderung bergantung pada bantuan internasional. Banyak proyek pendidikan, termasuk pembangunan sekolah dan pelatihan guru, didanai oleh donor luar negeri. Ketergantungan ini bisa menyebabkan ketidakpastian dalam pendanaan, terutama ketika situasi politik atau ekonomi berubah. Ini berarti bahwa meskipun ada kebijakan yang baik, efektivitasnya sering kali terhambat oleh ketidakpastian dalam alokasi anggaran.

Di Nigeria, salah satu keberhasilan yang signifikan dalam kebijakan pendidikan adalah pelaksanaan program *Universal Basic Education (UBE)*, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dasar gratis dan wajib bagi semua anak. Program ini telah meningkatkan jumlah anak yang terdaftar di sekolah dasar, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, terdapat inisiatif untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan penyediaan bahan ajar (Margiyono Suyitno, 2022). Banyak daerah juga telah mendapatkan dukungan dari donor internasional, yang membantu memperkuat infrastruktur pendidikan. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah pendaftaran, masalah kualitas pendidikan masih menjadi perhatian. Banyak sekolah menghadapi kekurangan fasilitas, dan guru sering kali tidak terlatih dengan baik. Selain itu, ketidakmerataan dalam distribusi dana antara

negara bagian menyebabkan disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan. Korupsi juga menjadi isu yang menghambat penggunaan anggaran secara efisien.

Di Kongo, tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan lebih mendasar. Meskipun ada kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, seperti peningkatan jumlah sekolah dasar, realitas di lapangan sering kali jauh dari harapan. Banyak anak tidak memiliki akses ke pendidikan karena kekurangan infrastruktur dan sumber daya. Di sisi positif, ada upaya untuk mendapatkan dukungan dari lembaga internasional, yang membantu mendanai proyek pendidikan. Ketidakstabilan politik dan ekonomi membuat implementasi kebijakan sulit dilakukan secara konsisten.

Keberhasilan di Kongo sering kali terkait dengan proyek bantuan internasional yang berhasil membangun beberapa sekolah dan menyediakan pelatihan untuk guru (Sulaeman et al., 2021). Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan ketidakpastian pendanaan. Banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar, dan banyak guru tidak menerima gaji yang cukup, yang berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran.

KESIMPULAN

Perbandingan anggaran pendidikan di Nigeria dan Kongo menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam alokasi dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Nigeria, dengan alokasi anggaran yang lebih besar, memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, masalah korupsi, pengelolaan yang tidak efisien, dan ketidakstabilan politik sering kali menghambat upaya tersebut, sehingga kualitas pendidikan tetap rendah dan aksesibilitas masih menjadi tantangan. Kongo menghadapi kesulitan yang lebih mendasar dengan alokasi anggaran yang relatif rendah. Meskipun persentase anggaran pendidikan terhadap PDB mungkin terlihat tinggi, kenyataannya, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang buruk sangat mempengaruhi kemampuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat partisipasi siswa dan hasil belajar, yang tetap di bawah standar internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan di kedua negara sangat bervariasi. Di Nigeria, ketidakpastian ekonomi dan dinamika politik berkontribusi terhadap fluktuasi dalam pengeluaran pendidikan. Di Kongo, tantangan struktural seperti konflik bersenjata, korupsi, dan ketidakpastian ekonomi menghambat perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Latif. Ahmad, J. (2021). EFEKTIVITAS UNITED NATIONS MISSIONS
- Aisyah, A., & Rani, A. R. (2023). Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i4.16547>
- Amin, B. (2015). Peran orang tua dalam pendidikan inklusif (peran orang tua anak berkebutuhan khusus dalam konteks sekolah inklusi). *Unisa*, 1.
- Arikunto suharsimi. (2019). Metodologi Penelitian (Tehnik Pengambilan Sampel. *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika*, 1.
- Esan, A. O. (2022). School Libraries and Educational Development in Nigeria: Issues and Prospects. *Indonesian Journal of Librarianship*. <https://doi.org/10.33701/ijolib.v3i2.2866>
- Fauziah, R. F., & Masyithoh, S. (2023). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Tadzkirah : Jurnal Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.55510/tadzkirah.v6i1.207>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2). <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Hawi, A. (2017). TANTANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1388>
- Irfan Syahroni, M. (2023). PENDIDIKAN ISLAM DI SUDAN. *EJurnal Al Musthafa*, 3(1). <https://doi.org/10.62552/ejam.v3i1.55>
- Jhuji, Wawan, W., Eneng, M., & Nana, S. (2020). Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2).
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue Maret).
- Management of Secondary School Teachers in Enhancing Quality Education in Kwara State, Nigeria (Pengurusan Guru Sekolah Menengah dalam Meningkatkan Kualiti Pendidikan di Nigeria). (2019). *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 44(02). <https://doi.org/10.17576/jpen-2019-44.02-10>
- Margiyono Suyitno. (2022). Model Kurikulum Pendidikan Terpadu Berbasis Nilai Keagamaan. *Journal of Educational and Language Research*, 1(8).
- Melia Dwiyani, M., Rainy Priadarsini, N., & Prameswari, A. (2015). Peran Unicef Dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Nigeria. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(03).
- Nabila, N. (2021). Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(5). <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i5.170>
- Naibaho, M. A., Nasution, N. U., Zuhro, R., Abdul, T., Harahap, W., & Ardhiansyah, Y. (2023). Evaluasi Program Anggaran Pendidikan pada Pengelolaan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).

- Nurhayati. (2022). Determinasi Manajemen Pendidikan Islam. *Jmpis*, 3(1).
- Odebode, A. A. (2019). Factors Responsible for Students' Unrest in Nigerian Tertiary Institutions: Implications for Counselling Practices. *MIMBAR PENDIDIKAN*, 4(2). <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i2.22199>
- Okediji, & Hannah Adebola Aderonke. (2017). Effect of Oral Traditions, Folklores and History on the Development of Education in Nigeria, 1977 Till Date. *Journal of History Research*, 7(2). <https://doi.org/10.17265/2159-550x/2017.02.001>
- ORGANIZATION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (MONUC) DALAM KONFLIK DI REPUBLIK DEMOKRASI KONGO. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Pewangi, M. (2017). TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.347>
- Prasetya, S. A., & Fahmi, M. (2020). Reorientasi, Peran dan Tantangan Pendidikan Islam di tengah Pandemi. *TARBAWI*, 9(1). <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v9i1.3128>
- Rifa, M. A. (2018). Tujuan, Pengorganisasian, Dan Struktur Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Afrika Selatan, Inggris, Dan Hongkong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1).
- Setyaningrum, W., Fitriyandi, G., & Khakim, M. (2022). UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1). <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5630>
- Sulaeman, A., Makhrus, M., & Makhful, M. (2021). Filantropi Islam dalam Upaya Pembentukan Karakter dengan Sistem Pendidikan Terpadu. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i2.11701>
- Wardhani, B. L. (2017). Respon Poskolonial terhadap Intensifikasi Pendidikan Kolonial di Afrika. *Jurnal Global & Strategis*, 10(1). <https://doi.org/10.20473/jgs.10.1.2016.137-151>